

**ANALISIS DAYA SAING EKONOMI PROVINSI
PAPUA TAHUN 2011-2018
(STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
PAPUA)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Farycha Masruri

165020101111001



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2020

ANALISIS DAYA SAING EKONOMI PROVINSI PAPUA TAHUN 2011-2018

(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua)

Farycha Masruri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: farycha42@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi perubahan struktur ekonomi masyarakat secara *multidimensional* guna mensejahterakan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang berfokus pada sektor unggulan dengan potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor dan potensi sektor ekonomi yang memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kotanya menggunakan perbandingan PDRB ADHK 2010. Dengan alat analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share* dan *Tipologi Klassen*. Sektor yang dapat menjadi daya saing daerah yaitu sektor yang tergolong basis, memiliki nilai *shift share* nol atau positif serta terdapat pada kuadran I.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya; Puncak Jaya; Mimika; dan Boven Digoel tidak memiliki sektor ekonomi. Kabupaten Kepulauan Yapen; Biak Numfor; Painai; Pegunungan Bintang dan Tolikara memiliki satu sektor ekonomi. Kabupaten Asmat; Puncak dan Dogiyai memiliki dua sektor ekonomi. Kabupaten Supiori memiliki tiga sektor ekonomi. Kabupaten Mappi; Yahukimo; Intan Jaya dan Deiyai memiliki empat sektor ekonomi. Kabupaten Keerom; Meamberamo Tengah dan Yalimo memiliki lima sektor ekonomi. Kabupaten Sarmi dan Waropen memiliki enam sektor ekonomi. Kabupaten Nabire; Meamberamo Raya dan Nduga memiliki tujuh sektor ekonomi. Kabupaten Merauke dan Lanny Jaya memiliki delapan sektor ekonomi. Kota Jayapura memiliki sepuluh sektor ekonomi dan Kabupaten Jayapura memiliki empat belas sektor ekonomi.

Kata kunci: Sektor Unggulan, Daya Saing, PDRB, LQ, Shift Share dan Tipologi Klassen.

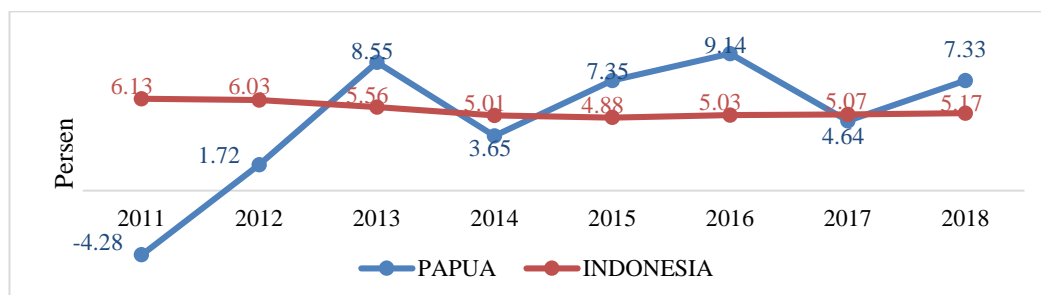
A. PENDAHULUAN

Era otonomi daerah, memberikan kesempatan pada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Prioritas pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi sumber daya lokal daerah tersebut. Karena ketika prioritas pembangunan tidak sesuai dengan potensi daerah maka sumber daya yang ada akan kurang dimanfaatkan secara maksimal sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kuantitatif untuk menggambarkan perkembangan perekonomian tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2006).

Dalam keberhasilan pembangunan daerah salah satu indikatornya adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi kontribusi yang diberikan sektor ekonomi terhadap PDRB maka pertumbuhan ekonomi akan mengarah yang lebih baik pada kesejahteraan masyarakat. Era globalisasi yang semakin meningkat membuat pemerintah daerah menciptakan *output* yang berdaya saing. Daya saing daerah merupakan kemampuan menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki daerah.

Provinsi Papua memiliki luas sebesar 316.552,6 km² sehingga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena ada beberapa pihak asing dan belum mampunya masyarakat lokal untuk mengelolanya. Selain itu belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik dalam menunjang sektor unggulan serta masih tingginya aksesibilitas pada daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan dan pendidikan dan sebagainya. Tetapi beberapa tahun belakangan perekonomian Papua mulai membaik salah satunya karena pembangunan infrastruktur.

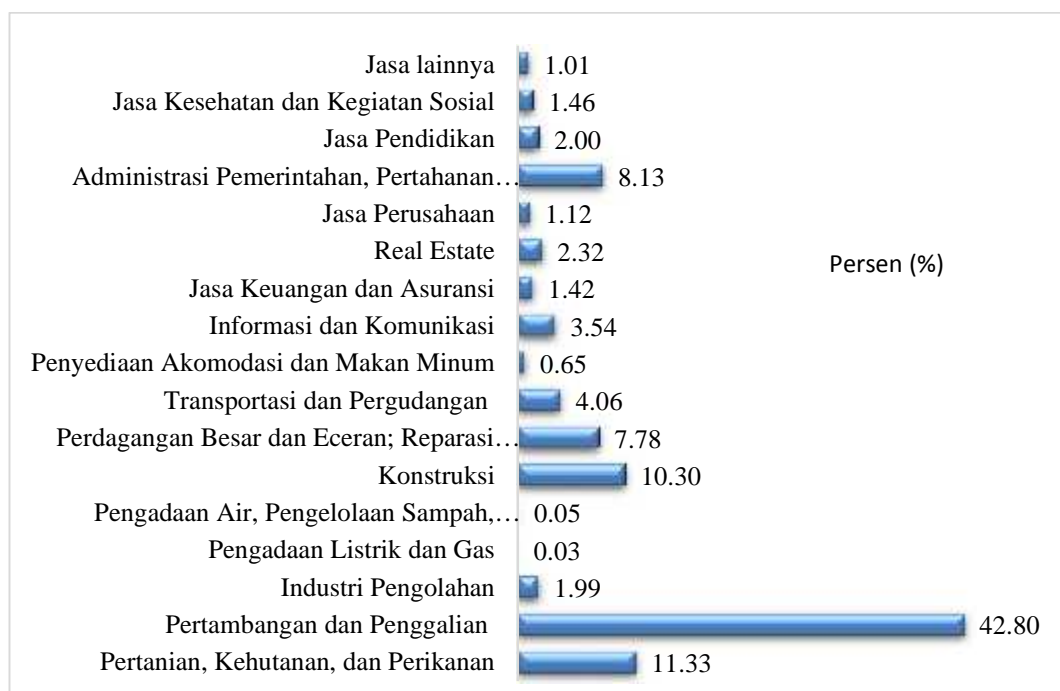
Gambar 1 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)



Sumber : BPS Indonesia, 2019

Berdasarkan Gambar 1 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Papua mengalami kenaikan hal ini didorong oleh sisi pengeluaran dan pendapatan, pada sisi pengeluaran didorong oleh komponen ekspor luar negeri dan dari sisi pendapatan didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian. Tetapi pada tahun 2016 Provinsi Papua mengalami penurunan hal ini terjadi karena penurunan konstruksi ekspor luar negeri seiring dengan perlambatan kinerja sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun tahun berikutnya mulai membaik karena ada optimalisasi kinerja pertambangan dan ekspor. Peningkatan dan penurunan yang terjadi pada sektor pertambangan penggalian akan mempengaruhi perekonomian Provinsi Papua karena sektor tersebut memiliki kontribusi terbesar dibandingkan sektor lain yaitu sebesar 42,80 persen. Untuk mengetahui kontribusinya dapat dilihat di bawah sebagai berikut.

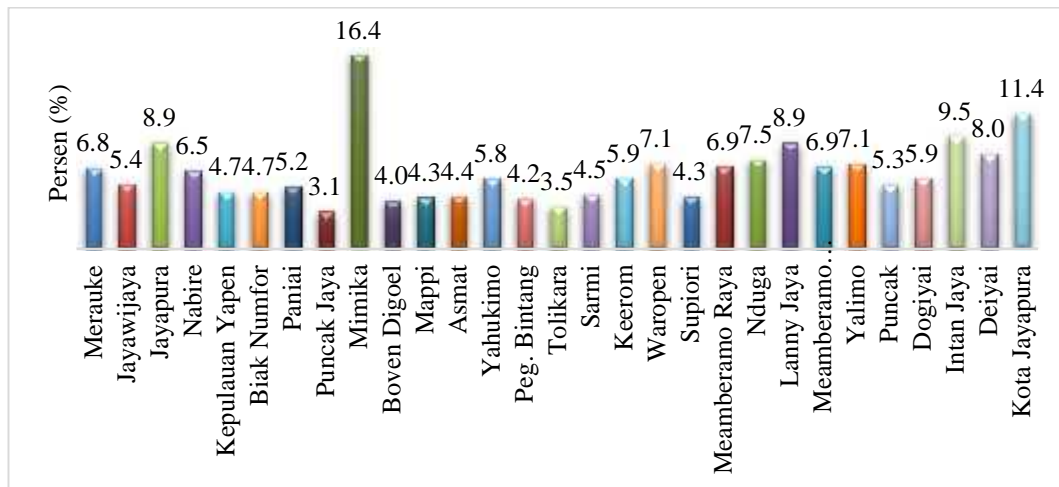
Gambar 2 : **Rata-rata Kontribusi Sektor Ekonomi Provinsi Papua (Persen)**



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2019

Pada hierarkinya suatu wilayah yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Maka kontribusi pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dianggap penting dalam membentuk perekonomian kearah yang lebih baik. Rata-rata laju pertumbuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua periode 2011-2018 kontribusi tertinggi adalah Kabupaten Mimika sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Puncak Jaya.

Gambar 3 : Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2011-2018 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua dan diolah, 2019

Setiap daerah menyumbang kontribusi sesuai potensi daerah, dengan meningkatkan daya guna potensi daerah dapat diketahui dengan identifikasi sektor unggulan yang lebih potensial dan menjadi daya saing daerah karena memiliki keunggulan komparatif serta dapat menumbuhkembangkan kemampuan sektor lain.

B. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah proses perubahan kearah yang lebih baik dan terencana. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengakibatkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004). Dalam pembangunan ekonomi dilakukan dengan penguatan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya dan *good governance*. Sehingga dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan keseimbangan antara pemerintah, dunia usaha atau swasta dan masyarakat agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dan terlaksana. Pemerintah dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan dua pendekatan yang harus digunakan secara bersamaan, yaitu :

- a. Pendekatan Sektoral, merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan sektor dan dianalisis satu per satu untuk melihat potensi dan peluang yang ditingkatkan.

- b. Pendekatan Regional, memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil (wilayah yang belum dimanfaatkan secara optimal) dengan potensi dan daya tarik (potensi dan peluang yang lebih tinggi).

Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output perkapita atau total output dalam jangka panjang dan bersifat *self-generating*. Berbagai macam teori dalam pertumbuhan ekonomi yang komprehensif, tetapi tidak satupun yang dapat menjadi standar baku. Hal ini dikarenakan setiap teori memiliki kekhasan yang sesuai dengan latar belakang teori tersebut.

- a. Teori Pertumbuhan Klasik

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu jumlah penduduk, barang modal, luas tanah dan kekayaan alam. Tetapi teori ini menekankan pada jumlah penduduk. Karena teori ini menganggap bahwa ketika terjadi peningkatan pada jumlah penduduk maka akan diiringi dengan sumber daya yang mumpuni sehingga produk marginal akan sama dengan pendapatan perkapita. Tetapi dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur hanya saja memberikan kebebasan untuk setiap orang/badan untuk berusaha, tidak membuat peraturan yang menghambat pergerakan orang, menjaga keamanan dan ketertiban dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi dengan efisien dan akan tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori yang muncul akibat perluasan teori pertumbuhan klasik, dimana mulai muncul faktor teknologi dan menggunakan model produksi yang mensubstitusikan antara modal dan tenaga kerja sehingga menjadi $Y = f(K, L, t)$. Menurut Harrod Domar pertumbuhan ditentukan oleh *kapital* dan *labor* dianggap konstan. Teori ini menyamakan bahwa *investment=saving* karena ketika masyarakat suka menyimpan uang kontan di rumah tanpa tujuan tertentu maka akan menghambat perekonomian. Pada pasar persaingan sempurna MPL bersifat terbalik dari MPK, dimana modal akan mengalir dari daerah yang upahnya tinggi ke daerah yang upahnya rendah sedangkan tenaga kerja akan mengalir dari daerah yang upahnya rendah ke daerah yang upahnya tinggi.

- c. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat Yang Disinergikan

Teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan diperkenalkan oleh Samuelson (1955). Setiap negara atau daerah perlu melihat komoditi yang memiliki potensi besar

dan dapat dikembangkan dengan cepat agar hasil, baik karena memiliki *competitive advantage* maupun karena potensi alam untuk dikembangkan. Dengan kebutuhan modal yang sama sektor dapat memberikan nilai tambah dan dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat. Sehingga produknya dapat bersaing dan memberikan kontribusi dalam perekonomian. Mensinergikan sektor merupakan membuat sektor saling terkait dan saling mendukung. Dengan menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikan dengan sektor lain akan menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian dengan cepat.

d. Teori Basis Ekonomi

Teori yang memandang adanya keterkaitan antar sektor ekonomi di suatu daerah dengan salah satu sektor pendorong terhadap sektor lain. Ketika sektor unggulan atau basis dikembangkan dengan baik maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Konsep dasar basis ekonomi dibagi menjadi dua sektor yaitu :

- 1) Sektor basis, merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif lebih tinggi. Aktivitas sektor basis akan mampu menjual produknya baik di dalam maupun luar daerah dan dapat meningkatkan kesempatan kerja yang akan berakibat pada peningkatan pendapatan regional.
- 2) Sektor non basis, merupakan sektor yang berfungsi sebagai penunjang sektor basis karena sektor lainnya yang kurang potensial. Sektor non-basis tergantung pada perkembangan yang terjadi pada sektor basis di mana akan menyebabkan terjadinya perubahan konsumsi dan investasi daerah.

Teori ekonomi basis berupaya menjelaskan perubahan struktur perekonomian regional dan kekuatan penunjang yang berasal dari salah satu sektor ke sektor lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga teori ini dapat digunakan untuk menentukan sektor mana yang lebih baik dikembangkan sesuai spesialisasi dan potensi sektor di suatu daerah tertentu.

PDRB Sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki. Nilai PDRB merupakan salah satu indikator makro dalam menunjukkan perekonomian daerah periode tertentu. Terdapat tiga pendekatan dalam penyusunan PDRB yaitu :

- a. Pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas dasar harga barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah dalam jangka waktu tertentu ditambah pajak atas produk neto.
- b. Pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah dari semua komponen permintaan akhir yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran lembaga swasta yang tidak mencari utang, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok/inventori dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Sektor Unggulan Sebagai Daya Saing Ekonomi Daerah

Sektor unggulan berkaitan dengan suatu perbandingan dimana sektor dikatakan unggul jika dapat bersaing dengan sektor yang sama di suatu daerah lain. Sektor unggulan merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Richardson, 2000). Sektor unggulan suatu daerah memiliki hubungan erat dengan PDRB daerah bersangkutan. Melalui data PDRB memberikan informasi mengetahui *output* pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di wilayah tersebut. Selain itu dapat menentukan sektor unggulan daerah, dan memberikan indikasi bagi perekonomian karena jika potensi yang dimiliki lebih besar maka akan lebih cepat tumbuh dibandingkan sektor lainnya. Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik dan internasional.

Pertumbuhan ekonomi hanya salah satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam peningkatan standar hidup masyarakat. Daya saing suatu daerah tercipta jika memiliki kompetensi inti yang diraih melalui upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang lebih baik. Semakin baik pengintegrasian dan pengkoordinasiannya maka semakin tinggi pula upaya penciptaan kompetensi inti dan menyulitkan wilayah lain untuk bersaing dengan wilayah tersebut.

Faktor Yang Membuat Daerah Memiliki Keunggulan Komparatif

- a. Pemberian alam, yaitu kondisi alam yang menghasilkan suatu produk tertentu, seperti adanya bahan tambang yang dihasilkan.

- b. Masyarakat yang menguasai teknologi dan menemukan hal baru untuk jenis produk tertentu.
- c. Masyarakat yang memiliki dan menguasai keterampilan khusus seperti membuat ukiran atau kain songket.
- d. Wilayah yang berdekatan dengan pasar, karena akan menjadi efisien pada biaya transportasi dan pemasaran.
- e. Wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi
- f. Terdapat daerah sentra dari kegiatan sejenis, karena dapat menjamin kepastian adanya barang dalam kualitas maupun kuantitas yang diinginkan dan dapat menurunkan biaya transportasi/pemasaran.
- g. Daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan, dimana dapat memanfaatkan keuntungan aglomerasi yaitu efisiensi dalam biaya produksi dan dalam pemasaran.
- h. Upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup dan didukung oleh keterampilan yang memadai.
- i. Mentalitas masyarakat yang sesuai dengan pembangunan yang jujur, bekerja keras, terbuka dan disiplin agar kehidupan menjadi aman, tentram dan teratur.
- j. Kebijakan pemerintah, dengan cara pemerintah memberikan subsidi sementara agar mendorong sektor tersebut. Subsidi pemerintah dilakukan sementara agar sektor tersebut nantinya dapat bersaing tanpa subsidi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulannya menggunakan metode dokumentasi dari berbagai data dan informasi publikasi. Dimana penelitian ini bertempat di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sedangkan untuk menganalisisnya menggunakan metode analisis :

- a. *Location Quotient (LQ)*, untuk menunjukkan besar kecilnya peran sektor ekonomi dengan membandingkan sumbangan nilai tambah sektor ekonomi suatu wilayah terhadap sektor sama dalam skala nasional, dengan menggunakan rumus :

$$L = \frac{x/X}{Y/Y} \quad (1)$$

Hasilnya ketika $LQ > 1$ (sektor basis) artinya sektor tersebut sudah melebihi kebutuhan konsumsi daerah bersangkutan, $LQ > 1$ (sektor non basis) artinya sektor tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan konsumsi daerah bersangkutan, dan untuk $LQ = 1$ (swasembada) artinya produksi sektor tersebut hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan daerah bersangkutan.

- b. *Shift Share*, untuk mengetahui transformasi atau struktur ekonomi suatu wilayah. Karena pada prinsipnya daerah yang lebih besar akan mempengaruhi daerah yang lebih kecil, karena produktivitasnya akan lebih besar sehingga permintaan domestic menjadi berlebihan dan agar tidak menurunkan harga maka produksinya akan diekspor ke daerah lain. Dalam melakukan perhitungan dapat menggunakan rumus :

$$\Delta E_{ij} = N \frac{E_{ij}}{E} + I \frac{E_{ij}}{E} + R \frac{E_{ij}}{E} \quad (2)$$

Dimana dari rumus tersebut terdapat tiga komponen yaitu *national share*, *industry mix* dan *regional shift*. *National share* merupakan pertumbuhan ekonomi regional disebabkan karena pertumbuhan ekonomi nasional. *Industry mix* untuk memperkirakan berapa banyak pekerjaan yang diciptakan atau tidak diciptakan pada setiap industry karena perbedaan industri dan total tingkat pertumbuhan nasional. Sedangkan *regional shift* digunakan untuk mengetahui sejauh mana daya saing sektor ekonomi daerah pada tingkat yang lebih luas.

- c. *Tipologi Klassen*, untuk mengetahui struktur dan pola pertumbuhan setiap sektor ekonomi. Dimana dengan pendekatan sektoral terdapat empat karakteristik sektor ekonomi antara lain yaitu :

- 1) Sektor cepat maju dan tumbuh pesat, sektor yang memiliki laju pertumbuhan sektoral dan kontribusi lebih tinggi dari rata-rata wilayah.
- 2) Sektor maju tapi tertekan, sektor yang memiliki kontribusi relative tinggi tetapi tingkat pertumbuhan sektoralnya lebih rendah dari rata-rata wilayah.
- 3) Sektor berkembang cepat, sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan sektoral lebih tinggi tetapi kontribusinya lebih rendah dari rata-rata wilayah.
- 4) Sektor relatif tertinggal, sektor yang memiliki laju pertumbuhan sektoral dan kontribusi lebih rendah dari rata-rata wilayah.

Tabel 1 : **Matrik Tipologi Klassen Dengan Pendekatan Sektoral**

Kontribusi Sektor	Pertumbuhan Sektoral	
	$g_i \geq g$	$g_i < g$
$s_i \geq s$	Sektor maju dan tumbuh pesat (I)	Sektor maju tapi tertekan (II)
$s_i < s$	Sektor berkembang cepat/potensial (III)	Sektor relatif tertinggal (IV)

Sumber : Syafrizal, 2008.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, secara keseluruhan menggunakan analisis *Location Quotient*, *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua periode 2011-2018 memberikan gambaran mengenai peran setiap sektor dilihat dari perkembangan daya saing, keunggulan kompetitif dan pengaruh pertumbuhan sektor sama di Provinsi Papua. Hasil analisis ini dapat dikategorikan sebagai sektor ekonomi yang berdaya saing dilihat dari sektor tersebut termasuk sektor basis, nilai *shift share* lebih dari nol atau positif dan terdapat pada kuadran tipologi kelas I.

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua juga harus didasarkan pada RPJMD menurut daerah. Karena rata-rata isu strategis pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yaitu rendahnya akses dan kualitas pendidikan yang berdampak pada daya saing; rendahnya akses kualitas layanan kesehatan; belum optimalnya penerapan otonomi khusus; tingginya konflik dan kriminalitas; besarnya kerusakan lingkungan hidup; rendahnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah; rendahnya akses energi; tingginya risiko bencana alam dan rendahnya kualitas infrastruktur. Maka dari itu perlu adanya kebijakan yang berdasarkan visi misi serta sasaran suatu daerah. Provinsi Papua dalam tahapan dan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK.

Kualitas SDM akan menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing perekonomian lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam disertai dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk memfasilitasi. Selain itu percepatan tersebut harus didukung dengan pengembangan dan pemantapan jaringan infrastruktur. Maka pengelolaan sumber daya alam harus didasarkan pada kesadaran masyarakat dan semua pihak kelembagaan dan pemerintah daerah agar menjadi modal penguatan kegiatan ekonomi lokal untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing ekonomi Papua, serta modal pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan yang dihasilkan dan diselaraskan dengan pemanfaatan potensi alam dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan harus konsisten dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan daerah.

Tabel 2 : Hasil Perhitungan *Location Quotient*, *Shift Share* dan *Tipologi Klassen*

Kab/Kota	Sektor Ekonomi Berdasarkan Hasil Analisis <i>Location Quotient/Shift Share/Tipologi Klassen</i>																
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Merauke	B/LD/4	NB/LD/3	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/4	B/LD/4
Jayawijaya	B/LD/4	NB/LD/3	B/LD/4	B/LD/4	NB/LD/2	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/4
Jayapura	B/LD/1	NB/LD/4	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/3	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1
Nabire	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	B/LD/1	NB/LD/2	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/3	B/LD/3	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/4	B/LD/4
Kep. Yapen	B/LD/1	NB/LD/2	B/LD/4	B/LD/4	B/LD/2	NB/LD/2	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/4	NB/LD/3	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/2	NB/LD/2	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/2
Biak Numfor	B/LD/4	NB/LD/3	B/LD/4	B/LD/1	B/LD/2	NB/LD/2	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/4	NB/LD/2	B/LD/2	B/LD/2	B/KD/2	B/KD/2	B/KD/4	B/KD/4	B/KD/4
Paniai	B/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	B/LD/1	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	B/KD/2	NB/LD/4	NB/LD/4
Puncak Jaya	B/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/0/4	B/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/4	B/KD/2	B/KD/4	B/KD/2	B/KD/2
Mimika	NB/LD/3	B/KD/2	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4
Boven Digoel	B/LD/4	B/LD/3	B/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	B/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/4	NB/LD/4
Mappi	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/3	B/LD/1	B/LD/4	B/LD/1	NB/LD/3
Asmat	B/LD/4	NB/KD/4	B/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/2	B/LD/1	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/4	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/4
Yahukimo	B/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/0/4	B/LD/1	NB/LD/4	B/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/3	B/LD/2	NB/LD/3	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/2	B/LD/1
Peg. Bintang	B/LD/1	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/0/4	B/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/2	NB/LD/3	NB/LD/2	NB/LD/4	B/LD/1	B/LD/4	B/LD/4	B/LD/4
Tolikara	B/LD/4	NB/LD/3	NB/KD/4	NB/KD/4	NB/LD/4	B/LD/1	NB/LD/4	B/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/4	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/2	B/LD/4
Sarmi	B/LD/1	NB/LD/3	B/LD/1	B/LD/3	NB/LD/1	B/LD/2	B/LD/4	B/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/3	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/2
Keerom	B/LD/1	NB/LD/2	B/LD/1	NB/LD/3	NB/0/4	B/LD/2	NB/LD/3	NB/LD/4	B/LD/4	NB/LD/2	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/4	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/4

Kab/Kota	Sektor Ekonomi Berdasarkan Hasil Analisis <i>Location Quotient/Shift Share/Tipologi Klassen</i>																
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Waropen	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/LD/4	B/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/1	B/LD/1	NB/LD/3	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/4	B/LD/1
Supiori	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	B/LD/1	NB/0/4	B/LD/2	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/2	NB/LD/3	B/LD/2	NB/LD/3	B/LD/2	B/LD/1	B/LD/2	B/LD/2
Mamberamo Raya	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/0/4	NB/0/4	B/LD/1	B/LD/1	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/0/4	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/3	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1
Nduga	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/0/4	NB/0/4	B/LD/1	B/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/0/4	B/LD/1	NB/LD/4	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/2
Lanny Jaya	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/0/4	NB/0/4	B/LD/1	NB/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/KD/4	NB/0/4	B/LD/1	NB/LD/4	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/2
Mamberamo Tengah	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/0/4	NB/0/4	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	B/LD/2	B/LD/1	B/LD/2	B/LD/2
Yalimo	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/0/4	NB/0/4	B/LD/1	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/0/4	NB/LD/3	NB/LD/4	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/2	B/LD/2
Puncak	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	B/LD/1	B/LD/1	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/3	B/LD/4	NB/LD/3	B/LD/4	NB/LD/1	NB/LD/4	NB/LD/4
Dogiyai	B/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/KD/4	NB/LD/2	B/LD/1	NB/LD/4	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/0/4	B/LD/2	NB/0/4	B/LD/4	NB/LD/4	B/LD/2	NB/LD/4
Intan Jaya	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/0/4	NB/0/4	B/LD/	NB/LD/3	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/LD/4	NB/0/4	NB/LD/3	NB/LD/4	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/2	B/LD/2
Deiyai	B/LD/1	NB/LD/3	NB/LD/3	NB/0/4	NB/0/4	B/LD/1	B/LD/1	NB/LD/2	NB/0/4	NB/0/4	NB/LD/2	NB/LD/3	NB/0/4	B/LD/1	B/LD/1/2	B/LD/2	B/LD/2
Kota Jayapura	NB/LD/3	NB/LD/3	B/LD/1	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/1	B/LD/2	B/LD/1	B/LD/2	B/LD/2	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1	B/LD/1

Keterangan : (1) Pertanian; Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah dan Daur Ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12) Real Estate, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa lainnya.

B : Basis dan NB : Non Basis

DAYA SAING DAERAH

LD : Lebih Dari 0 dan KD : Kurang dari 0

1 : kuadran I, 2 : kuadran II, 3 : kuadran III dan 4 : kuadran IV

Sumber : Penulis, 2020

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sektor ekonomi yang dikatakan dapat menjadi daya saing daerah adalah sektor yang termasuk dalam sektor basis, nilai *shift share* lebih dari nol atau positif dan berada pada kuadran I (sektor maju dan tumbuh pesat). Sektor ekonomi yang menjadi daya saing daerah menurut kabupaten/kota adalah Kabupaten Merauke (sektor ke 5,6,7,8,9,10), Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura (sektor ke 1,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17), Kabupaten Nabire (sektor ke 1,4,6,7,8,11,12), Kabupaten Kepulauan Yapen (sektor ke 1), Kabupaten Biak Numfor (sektor ke 4), Kabupaten Paniai (sektor ke 6), Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi (sektor ke 1,6,14,16), Kabupaten Asmat (sektor ke 6), Kabupaten Yahukimo (sektor ke 6,14,15), Kabupaten Pegunungan Bintang (sektor ke 1 dan 14), Kabupaten Tolikara (sektor ke 6), Kabupaten Sarmi (sektor ke 1,3,5,14,15,16), Kabupaten Keerom (sektor ke 1,3,14,15,16), Kabupaten Waropen (sektor ke 1,12,14,15,17), Kabupaten Supiori (sektor ke 1,4,15), Kabupaten Meamberamo Raya (sektor ke 1,6,14,15,16,17), Kabupaten Nduga (sektor ke 1,6,12,14,15,16), Kabupaten Lanny Jaya (sektor ke 1,6,12,14,15,16), Kabupaten Meamberamo Tengah (sektor ke 1,6,7,8,15), Kabupaten Yalimo (sektor ke 1,6,7,14,15), Kabupaten Puncak (sektor ke 1,6,7), Kabupaten Dogiyai (sektor ke 7) Kabupaten Intan Jaya (sektor ke 1,14,15), Kabupaten Deiyai (sektor ke 1,6,7,14) dan Kota Jayapura (sektor ke 3,6,8,11,12,13,14,15,16,17).

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengacu pada kesimpulan penelitian ini, maka saran yang dianjurkan yaitu :

Dalam menetapkan kebijakan pengembangan dan pembangunan perekonomian daerah lebih baik diprioritaskan pada sektor yang unggul dan berpotensi dalam daya saing pada setiap daerah dalam hal ini kabupaten/kota karena dapat memberikan kontribusi besar kepada PDRB kabupaten/kota serta Provinsi Papua. Dengan didasarkan pada RPJMD untuk mengatasi permasalahan. Dengan meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kecil dan tradisional pada setiap daerah.

Dan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, pemerintah di setiap kabupaten/kota bahkan Provinsi Papua harus menambahkan alokasi dana yang digunakan pada sektor unggulan

agar meningkatkan hasil produksinya serta dukungan dengan berbagai perbaikan infrastruktur dan teknologi yang maksimal. Sesuai dengan RPJMD dalam peningkatan infrastruktur seperti pengembangan jaringan transportasi trans Papua, pengembangan depo BBM di wilayah selatan Papua, peningkatan bandara dan peningkatan distribusi bahan kebutuhan pokok menuju daerah terisolir.

Selain itu perlu adanya upaya untuk mensinergikan sektor unggulan suatu daerah karena memiliki daya saing dengan sektor ekonomi lain. Dengan mensinergikan sektor ekonomi dapat banyak menyerap tenaga kerja akibatnya akan menimbulkan dorongan dalam meratakan dan proses percepatan pertumbuhan ekonomi.

Serta karena keterbatasan dalam penelitian ini menggunakan tiga alat analisis, maka disarankan penelitian selanjutnya yang berhubungan dapat menggunakan lebih dari tiga alat analisis. Selain itu juga harus melakukan perbaruan data informasi agar nantinya dalam melakukan analisis kebijakan pembangunan ekonomi mendatang hasilnya dapat lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan* (edisi keempat). Yogyakarta: STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2019. *[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2010-2018 (Miliar Rupiah)*. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/956/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2018-miliar-rupiah-.html> diakses pada 11 November 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat. 2018. *Kabupaten Asmat Dalam Angka 2018*. <https://asmatkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/36e4ffa127d2777109ee49e1/kabupaten-asmata-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boven Digoel. 2018. *Kabupaten Boven Digoel Dalam Angka 2018*. <https://bovendigoelkab.bps.go.id/publication/2018/09/27/5c49fd4ad5d7750563a62033/kabupaten-boven-digoel-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deiyai. 2010. *Kabupaten Deiyai Dalam Angka 2010*. <https://deiyaikab.bps.go.id/publication/2012/02/24/48c50b3d9ba99293c9ff314a/kabupaten-deiyai-dalam-angka-2010.html> diakses pada 2 februari 2020.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dogiyai. 2018. *Kabupaten Dogiyai Dalam Angka 2018*. <https://dogiyaikab.bps.go.id/publication/2018/08/16/20fd98fc14d3d4680b738829/kabupaten-dogiyai-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura. 2018. *Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2018*. <https://jayapurakab.bps.go.id/publication/2018/08/17/b5fd9b2e2f810409be8aa31e/kabupaten-jayapura-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya. 2018. *Kabupaten Jayawijaya Dalam Angka 2018*. <https://jayawijayakab.bps.go.id/publication/2018/08/16/8d7ced12f063b1b93d84a2a7/kabupaten-jayawijaya-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 Februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom. 2018. *Kabupaten Keerom Dalam Angka 2018*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen. 2018. *Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Angka 2018*. <https://kepulauanyapenkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/93da4bf71468b22212b78d85/kabupaten-kepulauan-yapen-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lanny Jaya. 2018. *Kabupaten Lanny Jaya Dalam Angka 2018*. <https://lannyjayakab.bps.go.id/publication/2016/01/28/40e2852961a5ef022529c367/lanny-jaya-dalam-angka-2015.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi. 2018. *Kabupaten Mappi Dalam Angka 2018*. <https://mappikab.bps.go.id/publication/2018/12/07/c7c5c34986693860a35f20cc/kabupaten-mappi-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. 2018. *Kabupaten Mimika Dalam Angka 2018*. <https://mimikakab.bps.go.id/publication/2018/08/20/9b6778f62ffa1136f404045b/kabupaten-mimika-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. 2019. *Kabupaten Merauke Dalam Angka 2019*. <https://meraukekab.bps.go.id/publication/2019/09/30/794ebbb893f174f2baf02a6/kecamatan-merauke-dalam-angka-2019.html> diakses pada 2 Februari 2020.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire. 2018. *Kabupaten Nabire Dalam Angka 2018*. <https://nabirekab.bps.go.id/publication/2018/08/16/31850cd868da4306361a59d2/kabupaten-nabire-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nduga. 2018. *Kabupaten Nduga Dalam Angka 2018*. <https://ndugakab.bps.go.id/publication/2018/12/26/c893bf621386c3f4a16b1a8b/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-nduga-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Meamberamo Tengah. 2018. *Kabupaten Meamberamo Tengah Dalam Angka 2018*. <https://lannyjayakab.bps.go.id/publication/2016/01/28/40e2852961a5ef022529c367/lanny-jaya-dalam-angka-2015.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai. 2018. *Kabupaten Paniai Dalam Angka 2018*. <https://paniaikab.bps.go.id/publication/2019/11/06/8583c01d089a44d06c8601b9/kabupaten-paniai-dalam-angka-2019.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak. 2018. *Kabupaten Puncak Dalam Angka 2018*. <https://puncakkab.bps.go.id/publication/2018/11/28/ec218cee34a23130fb2d4919/kabupaten-puncak-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak Jaya. 2018. *Kabupaten Puncak Jaya Dalam Angka 2018*. <https://puncakjayakab.bps.go.id/publication/2018/10/10/ed243971d90180737f4f0b0c/kabupaten-puncak-jaya-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pegunungan Bintang. 2018. *Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Angka 2018*. <https://pegununganbintangkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/7ddd49967b09db87e6984b/kabupaten-pegunungan-bintang-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi. 2018. *Kabupaten Sarmi Dalam Angka 2018*. <https://sarmikab.bps.go.id/publication/2018/10/03/9a2ed4598b8b02b7ab9df518/kabupaten-sarmi-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori. 2018. *Kabupaten Supiori Dalam Angka 2018*. <https://supiorikab.bps.go.id/publication/2018/10/17/1140e6ff6c8a069c96085817/kabupaten-supiori-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolikara. 2018. *Kabupaten Tolikara Dalam Angka 2018*. <https://tolikarakab.bps.go.id/publication/2018/08/16/ab112bd13584cb4b757c6acb/kabupaten-tolikara-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Waropen. 2018. *Kabupaten Tolikara Dalam Angka 2018*. <https://waropenkab.bps.go.id/publication/2018/08/16/b635858111af4b2379577bf7/kabupaten-waropen-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kota Jayapura. 2018. *Kota Jayapura Dalam Angka 2018*. <https://jayapurakota.bps.go.id/publication/2018/08/16/774b52d53e3f175cc22a120a/kota-jayapura-dalam-angka-2018.html> diakses pada 2 februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2019. *Provinsi Papua Dalam Angka 2019*. <https://papua.bps.go.id/publication/2019/08/16/e43fc034219586add3878e48/rovinsi-papua-dalam-angka-2019.html> diakses pada 13 November 2019.
- Ferdinand Niyimbanira. 2018. *Comparative Advantage and Competitiveness of Main Industries in the North Eastern Region of South Africa : Application of Location Quotient and Shift Share Techniques*. International Journal of Economics and Finance Studies, Vol.10,(No.4) ISSN:1309-8055(online) diakses pada 19 Oktober 2019.
- Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo, Lisa rahmani, dan Yashinta Maya Fernanda. 2018. *A Competitiveness Analysis of Economic Sector in Tuban Regency, East Java*. Advances in Economics Business and Management Research, Vol.57 diakses pada 19 Oktober 2019.
- Joyohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan pemikiran ekonomi dasar teori ekonomi pertumbuhan dan perencanaan ekonomi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Moh. Khusaini. 2015. *A Shift Share Analysis on Regional Competitiveness A Case of Banyuwangi district, East Java, Indonesia*. Procedia – Social and Behavioral Sciencess 211 (2015) 738-744 diakses pada 15 Oktober 2019.
- Pratiwi Fadhila Ratu, Khusaini M dan Susilo. 2016. *Shift Sector Analysis Of Economy In Mamminasata Region. International Journal of Social and Local Economic Governance* Vol.2 (No.2) pages 103-108 diakses pada 04 Desember 2019.
- Singarimbun, Masri. 1982. *Tipe, Metode dan Proses Penelitian: Dalam Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Matahari Bhakti.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Sumatera Barat: Baduose Media.

Sukirno Sudono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (edisi kedua). Jakarta:Kencana.

Sun'an Muammil. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta:Mitr Wacana Media.

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (edisi revisi). Jakarta:Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (edisi revisi). Jakarta:Bumi Aksara.

Wahyuningtyas Rosita, Rusgiyono Agus, dan Wilandari Yuciana. 2013. *Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)*. Jurnal Gaussian. Vol.2 (No.3) Hal 219-228 diakses 4 Desember 2019.

Yulianita Anna. 2009. *Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Journal of Economic & Development. Vol.7 (No.2) Hal 70-85 diakses 04 Desember 2019.